

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bagir Manan 2000, *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

\_\_\_\_\_, 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: Penerbit Gama Media.

\_\_\_\_\_, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill.Co.

\_\_\_\_\_, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Alumni.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm.17.

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

C.S.T Kansil, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Perkembangan Kemerdekaan 1945*, Jakarta: Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_, 1983, *Praktek Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.

Haposan Siallagan dan Efik Yusdiansyah, 2008, *Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Medan: UHN Press.

Herman Sihombing, 1996, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Jakarta: Konstitusi Pers.

\_\_\_\_\_, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2004, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Hanns Seidel Foundation Indonesia.

Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Sleman: Kanisius.

\_\_\_\_\_, 1998, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.

Meriam Budiardjo, 1996, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia.

Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press

Peter Mahmud Marzuki, 2010 *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sjahran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.



Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 Dalam Perkara Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## **C. Artikel dan Jurnal**

A. Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Ali Marwan Hsb, 2017, Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (*Compelling Circumstances of The Enactment Government Regulation In Lieu Of Law*), Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14.

- Almanar, Husni Jalil & M. Nur Rasyid, 2015, *Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 3.
- Andràs Jakab, 2006, *German Constitutional Law and Doctrine on State of Emergency- Paradigms and Dilemmas of a Traditional (Continental) Discourse*, jurnal *German Law*, Volume 10.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, 2017, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum*, Padjdjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, .
- Gabriel L. Negretto, 2004, *Government Capacities and Policy Making by Decree in Latin America: The Cases of Brazil and Argentina*, *Comparative Political Studies*, Volume 37, Nomor 5.
- Imran Juhaefah, 2011, *Hal Ihwwal Kepentingan Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peratuean Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia.
- J. Mark Payne, Daniel Zovatto G., dan Mercedes Mateo Díaz, 2007, *Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America*, Washington, InterAmerican Development Bank, .
- J. Ronald Mawuntu, 2011, *Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Sistem Norma Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Unstrat, Volume 19, Nomor 5.
- Janpatar Simamora, 2009, *Multitafsir Pengertian Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan Perpu*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 1.

Jim Rossi, *State Executive Lawmaking in Crisis*, jurnal *Duke Law*, Volume 1, Nomor 56.

Jimly Asshidiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

John Reynolds, 2010, “*The Long Shadow Of Colonialism: The Origins of the Doctrine of Emergency In International Human Rights Law*” dalam Osgoode Hlml Law School, Research Paper, Nomor 19.

Kim Lane Scheppelle, 2003-2004, *Law In A Time Of Emergency: States Of Exception And The Temptations Of 9/11*, HeinOnline- 6 U. Pa. *Journal Of Constitutional Law*, Nomor 5, Volume 6.

M. Laica Marzuki, 2018, *Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 1, Nomor 3.

Michael G.H. Goni, 2019 dalam *Penyerapan aspirasi Masyarakat oleh Anggota DPRD di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 3.

Moza Dela Fudika, Aryo Akbar, dan Asri Muhammad Saleh, 2022, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Dalam Menakar Negara Berada Dalam Ikhwal Kegentingan Memaksa Oleh Presiden*, Jurnal Panorama Hukum, Volume 7, Nomor 2.

Muhammad Fadli, 2018, *Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 15, Nomor 1.

Muhammad Siddiq, 2014, *Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah*

*Pengganti Undang-Undang Perppu*), Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Nomor 1, Volume 48.

Muhammad Siddiq, 2014, *Kepentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)*, Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 23111.

Muhammad Syarif Nuh, 2011, *Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Nomor 2, Volume 18.

Nur Rohim, 2014. *Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa*, Jurnal Cita Hukum, Volume 1, Nomor 1.

Siti Marwiah, 2015, *Kewenangan Konstitusional Presiden Terhadap Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 44, Nomor 3.

Sonya Claudia Siwu, 2019, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Majelis, Volume 2.

#### **Internet**

Berita Satu, *Dibanding Soeharto, SBY Lebih Banyak Keluarkan Perppu*, <http://sp.beritasatu.com/home/dibanding-soeharto-sby-lebih-banyak-keluarkanperppu/44244>.

CNN Indonesia, 2023, *Alasan Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja yang Gugurkan Putusan MK*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230101131025-32-894696/alasan-jokowi-terbitkan-perppu-cipta-kerja-yang-gugurkan-putusan-mk>.

Khairul Fahmi, 2023, *Perppu Tanpa Kegentingan Memaksa*,  
<https://mediaindonesia.com/opini/548688/perppu-tanpa-kegentingan-memaksa>.

Komisi IX, 2023, *Kurniasih Nilai Perppu Cipta Kerja Inkonsisten Dengan Putusan MK*,  
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42628/t/Kurniasih+Nilai+Perppu+Cipta+Kerja+Inkonsisten+Dengan+Putusan+MK>.

Konstitusi Argentina  
<http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/english.php>.

Konstitusi Brazil [http://www.servat.unibe.ch/icl/br00000\\_.html](http://www.servat.unibe.ch/icl/br00000_.html).

Konstitusi Ekuador  
<http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/english08.html>.

MPR RI, 2023, *Kritik Perppu Cipta Kerja, HNW: Seharusnya Presiden Laksanakan Putusan MK, Bukan Malah Membuat Perppu yang Dinilai Abaikan MK*, <https://www.mpr.go.id/berita/Kritik-Perppu-Cipta-Kerja,-HNW:-Seharusnya-Presiden-Laksanakan-Putusan-MK,-Bukan-Malah-Membuat-Perppu-yg-Dinilai-Abaikan-MK>.

Nano Tresna A., Lulu A., 2021, *MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun*,  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>

Universitas Islam Indonesia, 2023, *Dosen UII Berikan Pandangan Mengenai Perppu Cipta Kerja*, <https://www.uui.ac.id/dosen-uui-berikan-pandangan-mengenai-perppu-cipta-kerja/>.

Utami Argawati, 2022, *Konstitusi Butuh Penafsir Merdeka*,  
[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18490&menu=2#:~:text=Dengan%20demikian%2C%20MK%20sebagai%20penafsir,undang\)%20yang%20secara%20hukum%20mengikat](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18490&menu=2#:~:text=Dengan%20demikian%2C%20MK%20sebagai%20penafsir,undang)%20yang%20secara%20hukum%20mengikat)